

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Kabupaten Belu adalah kabupaten paling Timur dari Propinsi Nusa Tenggara Timur. Letak ini menjadikan kabupaten Belu sebagai wilayah jalur perlintasan internasional dengan Negara RDTL (Republica Democratica De Timor-Leste).¹

Luas wilayah Kabupaten Belu adalah 1.125,14 km². Secara astronomis, posisi kabupaten Belu terletak antara koordinat 124° 40' 33" BT– 125° 15' 23" BT dan 08° 70' 30" LS – 09° 23' 30" LS. Kabupaten Belu berbatasan dengan Selat Ombai di sebelah Utara Kabupaten Malaka di sebelah Selatan. Negara RDTL merupakan batas bagian Timur sedangkan bagian Barat berbatasan dengan Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU).²

Sebagian besar masyarakat Belu menggunakan Bahasa Tetun, Bunaq, Dawan, dan Kemak, walaupun begitu, Belu juga merupakan daerah yang multi-etnis karena terdiri dari beragam suku pendatang, diantaranya suku Timor, Rote, Sabu, Alor, Flores, Sumba, sebagian kecil suku Tionghoa dan pendatang dari Jawa, Ambon, Bugis Makassar dan beberapa suku bangsa lainnya. Berdasarkan sejarah, Masyarakat Belu juga berasal dari kelompok-kelompok ras, termasuk di dalamnya ras Melayu Tua (Proto Melayu), yang merupakan populasi awal di Pulau Timor, Melayu Muda (Deutero Melayu) dan Asia (China). Semua ras ini telah berbaur

¹ Kurniadi Lay dan Frans Soehartono, "Resor Wisata Kuda Ekuestrian Fulan Fehan di Kabupaten Belu, NTT," *JURNAL eDIMENSI ARSITEKTUR* VIII, no. 1 (2020): 625–32.

² "Yoakim Ansimus Berek, Asih Widi Lestari, dan Muhamad Rifa'i, "STUDI KEBIJAKAN TATA RUANG TERBUKA HIJAU KOTA ATAMBUA KABUPATEN BELU," *Jurnal Pendidikan Sejarah & Riset Sosial Humaniora* 3, no. 3 (2023)."

satu dengan yang lain bahkan terikat dalam sistem kekerabatan kawin-mawin yang berlangsung dari waktu ke waktu.³

Selain itu, Belu juga merupakan kota yang beragam agama penduduknya. Berdasarkan data BPS tahun 2022, agama Katolik dianut oleh 88,24 persen penduduk. Agama lain, seperti Protestan (7,03 persen), Islam (4,63 persen), Hindu (0,08 persen), dan Budha (0,01 persen).⁴ Hal ini menunjukkan karakter masyarakat yang semakin heterogen.

Berdasarkan gambaran di atas maka sebagaimana pada daerah-daerah lain di Indonesia, sangat terlihat bahwa di Belu, kemajemukan itu nampak bukan saja dalam soal etnis, ras, tetapi juga kehidupan beragama. Kemajemukan memang adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia. Bangsa kita memiliki karakteristik sebagai bangsa yang multietnik.⁵ Sebagai bangsa yang multietnik, keragaman Indonesia dilatarbelakangi oleh kondisi kewilayahan, suku, budaya, agama dan adat istiadat. Diperkirakan terdapat 931 etnik dengan 731 bahasa yang ada di Indonesia.⁶ Multietnis yang dimaksud tidak hanya secara fisik tetapi juga dalam sistem hukum, obat-obatan, religi, arsitektur, kesenian serta makanan.

Kemajemukan itu merupakan keunikan dan kekayaan bangsa tetapi kemajemukan itu berpeluang terjadinya disintegrasi atau perpecahan bangsa.⁷ Oleh karena itu sejak awal ajakan memahami kemajemukan terus didengungkan demi kerukunan. Dalam pidato

³ Nyoman Rema dan A.A. Gde Bagus, "POLA RUANG PERMUKIMAN DAN ARSITEKTUR TRADISIONAL KAMPUNG ADAT DUARATO," *Forum Arkeologi* 33, no. 1 (30 April 2020): 49, <https://doi.org/10.24832/fa.v33i1.581>.

⁴ "BPS Provinsi NTT," diakses 10 Januari 2024, <https://ntt.bps.go.id/indicator/108/84/1/persentase-pemeluk-agama-.html>.

⁵ Yoseph Yapi Taum, "MASALAH-MASALAH SOSIAL DALAM MASYARAKAT MULTIIETNIK" (Makalah, Focus Group Discussion: Identifikasi Isu-isu Strategis yang Berkaitan dengan Pembangunan Karakter dan Pekerti Bangsa, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta, Oktober 2006), <http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbyogyakarta/wp-content/uploads/sites/24/2014/11/Multietnik-Yapi.pdf>.

⁶ Taum.

⁷ Turnomo Rahardjo, "MEMAHAMI KEMAJEMUKAN MASYARAKAT INDONESIA (Perspektif Komunikasi Antarbudaya)" (Universitas Diponegoro, 2010), <http://eprints.undip.ac.id/19642/>, 4.

Presiden Soekarno ketika memperingati proklamasi kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945 mengingatkan pentingnya memahami kemajemukan budaya yang merupakan ciri bangsa Indonesia: *“Ingat kita ini bukan dari satu adat istiadat, ingat kita ini bukan dari satu agama, Bhineka Tunggal Ika, berbeda tetapi satu, demikianlah tertulis di lambang negara kita dan tekanan kataku sekarang ini kuletakan ke dalam kata Bhinna yaitu berbeda-beda. Ingat kita ini Bhinna, kita ini berbeda-beda...”*⁸ Dalam program-program pemerintah juga lahir berbagai upaya membangun kerukunan dalam bangsa yang majemuk. Berbagai gagasan telah dibuat oleh para menteri agama dari waktu ke waktu, setiap menteri memberikan kebijakan tentang masa depan kerukunan umat beragama sebagai syarat untuk kehidupan yang damai.⁹ Moderasi beragama juga adalah pendekatan dari atas, Kementerian Agama terus membahasakan kerukunan dalam kebijakannya.

Seruan kerukunan terus didengungkan sebab tidak bisa dipungkiri bahwa sekalipun enam agama yang sudah diakui negara Indonesia, kemajemukan bangsa yang seringkali melahirkan konflik datangnya dari agama. Kondisi kerukunan di Indonesia belumlah ideal, menurut Qowaid, masih terdapat kantong-kantong intoleransi, kantong-kantong kerawanan komunal dan elemen radikal yang harus terus diperbaiki.¹⁰ Agama bisa menjadi penyebab terjadinya kekerasan dan kehancuran umat manusia. Hal ini bertentangan dengan hakikat agama sebenarnya yaitu untuk menegakan perdamaian dan meningkatkan kesejahteraan umat.¹¹ Toleransi yang merupakan elemen dasar yang dibutuhkan untuk menumbuhkan sikap

⁸ Yohan Wahyu, “Pancasila Menjadi Perekat Bangsa,” *KOMPAS*, 1 Juni 2023, <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/06/01/pancasila-menjadi-perekat-bangsa>.

⁹ Mohammad Takdir, “Model-Model Kerukunan Umat Beragama berbasis Local Wisdom,” *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah* 1, no. 01 (9 Juli 2017): 61, <https://doi.org/10.32332/tapis.v1i01.728>.

¹⁰ Qowaid, “GEJALA INTOLERANSI BERAGAMA DI KALANGAN PESERTA DIDIK DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA MELALUI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH,” *Dialog* 36, no. 1 (31 Agustus 2013): 71–86, <https://doi.org/10.47655/dialog.v36i1.82>.

¹¹ Donna Crosnoy Sinaga dkk., “Pendidikan Agama Kristen dalam Masyarakat Majemuk,” *PROSIDING STT ERIKSON-TRITT*, 2021.

saling memahami dan menghargai perbedaan yang ada dalam masyarakat mejemuk belum sepenuhnya diaktualisasikan.

Belu dengan ciri khas kemajemukan agama juga tentu tidak lepas dari perbedaan-perbedaan pandangan, sikap dan lain sebagainya. Harus diakui bahwa kerukunan agama sudah terbina sejak dulu namun kerukunan yang terbina tidak selamanya berjalan mulus, sebagaimana juga yang terjadi di Belu. Pernah terjadi sebuah kasus di tahun 2017. Ada pengaduan dari Masyarakat RT. 11, RW. 2 kelurahan Manuaman kecamatan Atambua Selatan. Mereka mengirimkan surat pernyataan sikap ke bupati Belu dan ditanda-tangani oleh 30 orang tokoh adat dan tokoh masyarakat, tokoh agama baik yang beragama Kristen dan Katolik. Isi pengaduan itu ialah masyarakat merasa resah dan terganggu dengan bunyi volume suara di Mesjid khuznul Khotimah yang terlalu besar. Bunyi adzan di Mesjid tersebut terkadang juga tidak mempertimbangkan kegiatan keagamaan umat Katolik dan Protestan. Hal itu sudah pernah disampaikan kepada umat muslim tetapi tidak ditanggapi secara serius. Masyarakat tersebut juga menyampaikan bahwa pembangunan Mesjid tersebut tanpa surat ijin. Awalnya bangunan itu hanyalah rumah penduduk yang di pakai sebagai tempat untuk anak-anak belajar sholat lalu kemudian dijadikan sebagai Mushola dan berjalannya waktu ada pengembangan terhadap gedung itu sehingga umat muslim meningkatkan statusnya menjadi Mesjid. Atas kondisi ini, Wakil Bupati Belu, memfasilitasi pertemuan tersebut dengan menghadirkan pihak-pihak terkait diantaranya, Kesbangpol, Kepala Bimas Kristen Kementerian agama kabupaten Belu, tokoh agama Katolik, Kristen dan ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), pengurus Mesjid Khuznul Khotimah dan masyarakat RT. 11 RW. 2 yang mengirimkan surat pengaduan kepada Bupati Belu. Dari pertemuan itu diputuskan agar suara volume adzan di Mesjid dikurangi tetapi umat Katolik dan Kristen tetap memberi ruang bagi

umat muslim untuk menjalankan aktivitas keagamaan mereka sambil mereka melengkapi surat-surat untuk melegalkan status keberadaan masjid khuznul Khotimah di wilayah tersebut.

Tanggal 31 Januari 2023 Ketua Lingkungan Bunda Maria Para Beriman Toro Paroki Katedral Santa Maria Immaculata Atambua mengirimkan surat kepada ketua DPRD Belu perihal penyampaian surat pernyataan penolakan pembangunan Gereja Bethel Indonesia di Toro dan dokumen telaahan pembangunan GBI kelurahan Tulamalae, Kecamatan Atambua Barat dari kementerian Agama Kabupaten Belu yang ditulis pada tahun 2016 ditandatangani oleh Drs. Yosef Akoit, kepala kantor kementerian Agama kabupaten Belu dimana salah satu poin GBI tidak memenuhi persyaratan untuk diberikan ijin bangunan. Namun di tahun 2023 pembangunan gereja telah selesai dan kegiatan ibadah masih tetap berlangsung, juga papan nama gereja belum dicabut oleh pihak berwenang padahal belum ada ijin sampai sekarang.

Kondisi inilah yang mendorong ketua lingkungan Bunda Para beriman Toro meminta ketua DPRD mengambil sikap supaya tidak terjadi hal-hal buruk antarumat beragama. Sebab terjadi juga tindakan perkelahian yang menimbulkan disharmonisasi ditengah masyarakat berkaitan dengan kegiatan gereja tersebut. Ada 160 orang yang terdiri dari toga, tomas dan masyarakat yang menandatangani surat pernyataan menolak pembangunan GBI dilingkungan wilayah RT 21, kelurahan Tulamalae.

Adapun kasus yang dijelaskan di atas dilatarbelakangi oleh beberapa hal:

- 1) Dalam hitungan statistik, presentase masyarakat setempat 99,99% beragama katolik.
- 2) Dalam wilayah RT 21/RW 04 terdapat tempat doa sesuai tradisi iman katolik yakni Gua Bunda maria atau Bunda Para beriman yang dimiliki paroki katedral, keuskupan Atambua. Gua Bunda Maria tersebut selain sebagai tempat doa juga

sesekali digunakan sebagai tempat misa kudus oleh umat Paroki Katedral. Kehadiran GBI Toro dengan aktivitasnya yang belum legal dapat disalahtafsirkan sebagai munculnya unsur kontra yang mengganggu ketenteraman masyarakat katolik

- 3) Berdasarkan informasi ketua lingkungan bunda para beriman Toro, khotbah Pdt Petrus Peong, Pendeta yang melayani di GBI sering menyinggung eksistensi kelompok beragama tertentu dan hal itu menimbulkan keresahan umat Katolik
- 4) Informasi petugas kantor kementerian agama melalui pendekatan dengan ketua RT 21 Toro, adanya sikap arogansi, intoleransi dan non kooperatif dari Pdt Petrus Peong dengan jemaatnya
- 5) Ada indikasi pembaptisan umat baru yang sebelumnya telah memeluk agama tertentu.

Pada bulan September 2016 masalah gereja tersebut sudah diselesaikan dalam sebuah pertemuan yang dipimpin oleh Sekda Belu (Alm. Drs. Petrus Bere, MM) di ruang Sekda Belu yang dihadiri oleh kementerian Agama Kabupaten Belu, Kesbangpol, Satpol PP, ketua dan wakil ketua lingkungan bunda para beriman Toro dan Pdt Petrus Peong dengan keputusan Pdt Petrus Peong segera mengurus ijin pendirian gereja dan ijin untuk melaksanakan ibadah di rumah, selama belum ada ijin disarankan untuk beribadah di gereja Betel lain. Pdt Petrus Peong diminta menghentikan kegiatan pembangunan Gereja tersebut dan Satpol PP diminta mencabut papan nama gereja.

Surat penolakan terhadap GBI juga di tujukan kepada FKUB kabupaten Belu dan dalam rapat intern anggota FKUB, dibuatlah pernyataan sikap kepada pemerintah daerah untuk segera memfasilitasi pertemuan antara kedua belah pihak agar ditemukan solusi dari persoalan tersebut. Anggota FKUB juga mengunjungi GBI dan melakukan komunikasi dengan Pendeta GBI tersebut.

Hingga hari ini kondisi menjadi kondusif sebab melalui pertemuan bersama, ada penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh pihak GBI terkait upaya mereka untuk pengurusan ijin pendirian gereja dan kendala-kendala yang mereka temui dilapangan. Hal-hal lain yang dikeluhkan pihak pengadu diselesaikan bersama dari hati ke hati, pihak GBI menyanggupi untuk tidak meresahkan umat beragama lain dalam pelaksanaan ibadah-ibadah mereka dan umat Katolik berkenan memberi ruang bagi anggota GBI untuk melaksanakan kegiatan keagamaan mereka dengan menyelesaikan tuntutan-tuntutan pendirian gereja.

Dua kasus ini terjadi di wilayah kecamatan yang berbeda, kecamatan Atambua Selatan dan kecamatan Atambua Barat. Itu berarti dua kasus menjadi gambaran kondisi masyarakat Belu dan mewakili beberapa kasus lain yang menjelaskan bahwa riak-riak kecil dalam suatu wilayah yang penduduknya beragam pasti ada. Karena itu kerukunan harus secara sengaja dirawat, merawat kerukunan secara sengaja untuk mencegah konflik sudah diingatkan oleh Yanuarius Seran, bahwa berbagai identitas sosial karena heterogenitasnya dan pluralitas tidak dikelola secara cerdas dan secara bijak, dapat menimbulkan berbagai konflik.¹² Sepanjang ada keinginan untuk mengelola perbedaan itu secara bijak tentu kerukunan akan tetap terjaga.

Peran tokoh agama, para pemangku kepentingan dalam mengupayakan penyelesaian masalah cukup terlihat termasuk pihak-pihak yang mengadu cukup lentur menerima masukan dan arahan dari pihak-pihak yang berwenang menangani kasus yang ada. Hal itu tentu menjadi sebuah gambaran bahwa dalam perbedaan seperti apapun, dengan duduk bersama dan mencari solusi atas persoalan itu maka selalu ada solusi, apalagi masyarakat Belu diikat

¹² Yanuarius Seran, "The Role of Christian and Islamic Leaders to Strengthen Local Wisdom in Atambua," *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 22, no. 2 (9 April 2022): 278–98, <https://doi.org/10.14421/esensia.v22i2.3246.>, 280

dengan kearifan budaya lokal yang melihat sesamanya sebagai saudara dan memiliki nilai kerukunan.

Banyak kali persoalan antaragama sulit diredam sehingga dari masalah yang kecil dan bisa diselesaikan pada akhirnya justru menjadi masalah besar dan merugikan banyak pihak. Hal itu dikarenakan pihak-pihak yang bertikai tidak memiliki kelenturan sikap dalam menyikapi berbagai persoalan, menempuh jalur yang benar untuk penyelesaian masalah. Jika hingga hari ini kerukunan masih tercipta di Belu, tentu bukan tanpa pertikaian karena perbedaan-perbedaan itu, tetapi mereka berupaya menempuh jalan penyelesaian yang benar, membangun dialog dengan difasilitasi oleh pihak-pihak yang berwenang. Kerukunan itu bukan hanya soal saling menghargai di dalam perbedaan tetapi berusaha menyikapi persoalan dengan bijak dan lentur untuk menerima setiap masukan tentu itu bagian dari cara menjaga kerukunan.

Kerukunan yang tercipta tentu saja didukung oleh peran berbagai pihak. Pemimpin agama, pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Kesiapan untuk duduk bersama, membahas masalah bersama, dan menerima masukan serta menyepakati setiap hal untuk kebaikan bersama tentu didukung oleh satu faktor penting yaitu kearifan lokal yang melekat dalam diri orang-orang Belu.

Ada sejumlah kearifan lokal masyarakat Belu yang membingkai mereka dalam keseharian hidup. Masyarakat Belu hidup dalam keberagaman, namun mereka tetap hidup damai dan penuh cinta kasih. Hal ini terjadi misalnya karena masyarakat mempunyai seperangkat kearifan lokal seperti "*ita belu malu hadomi malu*" yang berarti "kita berteman dan saling mencintai". dan "*hit nekaf mese ansaof mese*" yang berarti "kita satu hati dan satu dada," yang selalu dijalani dan diamalkannya. Persahabatan yang dijalani haruslah *Belu*

Naktasak (Belu/persahabatan yang benar) bukan “*belu soe lerek*” (Persahabatan yang diinjak-injak).¹³ Kebiasaan hidup yang lahir dari kearifan lokal dipegang teguh oleh masyarakat Belu sebagai falsafah hidup mereka.

Kearifan lokal itu juga terwujud melalui keramahtamahan menerima tamu. Mereka menyajikan sirih pinang dan tumpangan. Hal ini diaplikasikan dalam persaudaraan sejati, yaitu persahabatan “*Belu too mate*”, yang berarti “Berteman sampai mati”, dan persaudaraan “*Knuk ida fatik ida*”, yang berarti “Berasal dari tempat atau rahim yang sama”.¹⁴

Orang Belu terbuka terhadap orang lain atau tamu yang mereka temui, sikap ini tumbuh dari filosofi nenek moyang “*hitin luan kbonan luan*”. *Hitin* berarti pangkuan, *Kbonan* berarti dada, *Luan* berarti luas atau lebar, jadi *Hitin luan Kbonan luan* berarti masyarakat Belu memiliki pangkuan yang luas untuk menerima dan merangkul orang lain.¹⁵ Di Belu, mutiara kearifan lokal menjadi tumpuan perdamaian dan persaudaraan sejati antar “saudara kandung” tetapi juga dengan setiap orang yang bertamu atau yang baru ditemui. Kearifan lokal dengan nilai keramahtamahan yang tinggi; hikmah yang melengkapi dan menguatkan prinsip-prinsip mulia agama, sebagaimana diungkapkan dalam Al-Qur'an dan Alkitab.¹⁶

Dalam bahasa Tetun, Belu berarti teman atau sahabat. Menurut para tokoh adat, kata "Belu" memiliki arti persahabatan, yang dalam bahasa Indonesia berarti sobat atau teman. Hal ini memberi makna simbol yang menunjukkan bahwa orang-orang di Belu pada zaman dahulu sangat bersahabat dan saling memperhatikan satu dengan yang lain.¹⁷ Kehadiran suku

¹³ Seran.

¹⁴ Seran.

¹⁵ Seran.

¹⁶ Seran.

¹⁷ YB Hale, “Sistem Informasi Geografis Persebaran Usaha Mikro Kecil dan Menengah” (ITN Repository, 2019).

dan agama lain yang mendiami tanah perbatasan tidak menjadikan mereka berbeda dan menjadi alat pertikaian. Kerukunan dan sikap solidaritas tetap dijunjung tinggi. Hal ini menggambarkan kalau arti Belu merupakan perwujudan pribadi orang-orang Belu yang bisa menjadi pesan penting bagi kerukunan hidup beragama, seperti yang tampak di dalam dan diupayakan oleh film “Aisyah Biarkan Kami Bersaudara.”¹⁸

Pandangan ini juga ditegaskan oleh Branch yang dikutip oleh Beni Ahmad Saebani, dalam bukunya *Sosiologi Perkotaan*. Branch menjelaskan bahwa salah satu unsur yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kota adalah sejarah dan kebudayaan. Karena sifat fisik dan masyarakat kota dipengaruhi oleh sejarah dan kebudayaan yang melatarbelakanginya, perkembangan kota juga dipengaruhi oleh sejarah dan kebudayaan tersebut.¹⁹ Kebiasaan hidup para leluhur yang menorehkan kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik tentu saja akan tinggal tetap dalam hati dan kehidupan generasi selanjutnya.

Disadari pula bahwa selain sejarah dan kebudayaan yang memengaruhi karakter fisik masyarakat kota, disisi yang lain, karakteristik sebuah kota biasanya terlihat dari kemajuan kota oleh karena berbagai perkembangan misalnya kepadatan penduduk, area yang padat bangunan, serta perekonomian yang didukung oleh sektor industri dan jasa. Selvester Melanton Tacoy mengatakan bahwa perkembangan kota yang pesat biasanya membawa masyarakat kota cenderung bersifat individualistis yaitu menjadi egois, tidak memiliki toleransi sosial serta melonggarkan norma-norma agama.²⁰ Hal ini ditegaskan oleh Deby Tarigan, yang melihat masyarakat kota sebagai masyarakat modern, ia menyadari bahwa

¹⁸“Selengkapnya mengenai film itu, lihat Ariq Malik, “Membangun Nilai-nilai Toleransi antar Umat Bergama dan Pluralisme dalam Film Aisyah Biarkan Kami Bersaudara,” *Copi Susu: Jurnal Komunikasi, Politik & Sosiologi* 3, no. 2 (2021): 1–9.

¹⁹ Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Perkotaan Memahami Masyarakat Kota dan Problematikanya* (Bandung: CV Pustaka Setia Bandung, 2017).

²⁰ Selvester Melanton Tacoy, “Pelayanan Dalam Konteks Masyarakat Perkotaan,” *Jurnal Teologi Kontekstual Indonesia* 1, no. 1 (29 Juni 2020): 36, <https://doi.org/10.46445/jtki.v1i1.300>.

prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan seperti solidaritas, gotong royong dan kerukunan telah berkurang.²¹ Pandangan dua penulis ini berbeda dengan kehidupan masyarakat di Belu.

Sebagaimana kota-kota pada umumnya, kabupaten Belu juga mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Perkembangan yang di alami oleh karena kabupaten Belu kini merupakan kota terbesar kedua di pulau Timor secara ekonomi, populasi, pemerintahan, dan faktor lainnya, tetapi pesatnya perkembangan kota, tidak memengaruhi kehidupan masyarakat Belu untuk menjadi individualis. Hal itu tergambar dari sikap-sikap penduduknya yang menghargai keberagaman dan menjunjung tinggi nilai kerukunan. Kearifan-kearifan lokal itu dijiwai dalam keseharian hidup sehingga membentuk karakter masyarakat Belu. Berbagai bentuk perbedaan bahkan kemajuan kota tidak menggeserkan pemahaman dan keyakinan mereka untuk hidup dengan saling terbuka dan menerima satu dengan yang lain.

Selain berbagai filosofi hidup masyarakat Belu yang tertanam di dalam hati dan dihidupi mereka, ada juga nilai kerukunan yang dimunculkan melalui kearifan lokal masyarakat Belu yaitu konstruksi rumah adat Matabesi. Konstruksi rumah adat ini menarik bagi penulis karena melalui rumah adat terkandung nilai-nilai luhur yang telah dihidupi dan diwariskan secara turun-temurun kepada generasi penerus. Masyarakat Matabesi tidak hanya memandang rumah adatnya sebagai tempat tinggal semata, akan tetapi lebih dari itu masyarakat meyakini bahwa rumah adatnya memiliki jiwa, sebagai wadah untuk berkumpul melaksanakan ritual, menyelesaikan masalah, membuat aturan-aturan, sekaligus sebagai tempat melahirkan nilai-nilai kebersamaan, gotong-royong, kekeluargaan, persaudaraan, tanggungjawab, kepercayaan, dan nilai moral dalam masyarakat. Tak hanya itu ada nilai lain

²¹ Debby Ingan Malem Tarigan, "KAJIAN GAYA HIDUP MASYARAKAT DI KELURAHAN BAHU KECAMATAN MALALAYANG KOTA MANADO," *ACTA DIURNA KOMUNIKASI* 4, no. 4 (2015).

yang juga terkandung yaitu nilai perdamaian dan rekonsiliasi.²² Nilai-nilai ini tentu saja menjadi jalan untuk menata kehidupan yang rukun dalam kemajemukan agama yang ada di Belu.

Ada banyak rumah adat di kabupaten Belu, berdasarkan penuturan Hale, tercatat ada 1.355 rumah adat yang tersebar diseluruh wilayah kabupaten Belu baik yang ada di wilayah pegunungan maupun di pesisir Pantai.²³ Pada umumnya rumah adat di pegunungan atau *Uma hae* bagian atapnya menggunakan rumput alang-alang sementara rumah adat di pesisir pantai atau *Uma Tali*, atapnya biasa menggunakan gewang atau daun tali.²⁴ Sebagian besar rumah-rumah adat ini mengalami perubahan konstruksi pada bangunannya melalui sumbangan pemerintah daerah. Beberapa diantaranya juga mengalami perubahan konstruksi oleh karena bahan-bahan rumah adat yang dipakai dari alam sudah mulai berkurang sehingga mereka harus membelinya di toko bangunan.

Hal menarik pada suku Matabesi ialah konstruksi rumah adatnya tetap dipertahankan. Tidak ada perubahan pada bentuk bangunannya sebab orang-orang suku Matabesi memahami bahwa perubahan konstruksi akan melahirkan pergeseran makna pada bangunan tersebut. Sebuah rumah adat dipandang sebagai struktur dari lembaga adat itu sendiri. Rumah adat itu menceritakan tentang alur hidup seseorang dari ia lahir sampai meninggal. Rumah adat itu adalah simbol dari anggota suku.²⁵ Ada ratusan suku yang ada di kabupaten Belu, namun suku Matabesi telah mampu menjadikan lokasi desanya sebagai desa wisata terbaik tahun 2015 tingkat provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal itu dikarenakan adanya partisipasi dan

²² Fredrikus Kono, "FUNGSI RUMAH ADAT SUKU MATABESI SEBAGAI SARANA PENDIDIKAN DAN PERDAMAIAN (Studi Kasus Kelurahan Umanen Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu)" (UNWIRA Repository, 2022), <http://repository.unwira.ac.id/7408/7/BAB%20VI.pdf>, 78.

²³ Yanuarius Gerlindo Hale, Wawancara dengan Pamong Budaya dalam Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kabupaten Belu, 5 Februari 2024.

²⁴ Christoforus M. Loemau, Wawancara dengan Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Belu, 5 Februari 2024.

²⁵ Wendelinus Manek, Wawancara dengan Fukun Matabesi, 23 Januari 2024.

inisiatif warga masyarakat suku untuk tetap mempertahankan kearifan lokal suku Matabesi dan telah mampu menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahunnya.²⁶

1.2 Penelitian terdahulu

Penelitian tentang upaya melestarikan kerukunan serta kearifan lokal sebagai daya pendukung kerukunan telah memanggil para akademisi untuk menggalinya, termasuk rumah adat sebagai kearifan lokal. Ada banyak kajian yang bersesuaian dengan penelitian ini. Yanuarius Seran melihat tentang peranan pemimpin agama dalam membangun dialog antarumat beragama di keuskupan Atambua. Wilayah keuskupan Atambua meliputi kabupaten Belu, kabupaten Malaka, dan kabupaten TTU. Yanuarius memberi penekanan pada soal dialog sebagai cara memelihara kerukunan dan menjadi media kondusif bagi terciptanya tata hubungan antarumat beragama di tengah masyarakat yang multikultural. Perbedaan yang ada memungkinkan setiap umat saling belajar apalagi TTU, Belu dan Malaka sekarang ini bukan lagi monokultural tetapi sudah menjadi multikultural.²⁷ Dialog menjadi tawaran dari Yanuarius sebagai cara melestarikan kehidupan yang harmoni.

Yanuarius melihat kunci kerukunan di Belu ada pada peran tokoh agama, berbeda dengan yang hendak ditelaah penulis dalam tulisan ini. Bagi penulis peran tokoh agama penting tetapi kearifan lokal sebagai warisan leluhur yang mengakar dalam kehidupan masyarakat Belu, juga tak kalah penting memberi pengaruh bagi kehidupan yang rukun di kabupaten

²⁶ Petrus Ans Gregorius Taek dkk., "UPAYA PELESTARIAN TRADISI BUDAYA SUKU MATABESI DALAM MODERNISASI," *COMMUNITY DEVELOPMENT JOURNAL: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT, UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI* 4, no. 2 (2023).

²⁷ Yanuarius Seran, "PERANAN PEMIMPIN AGAMA DALAM MEMBANGUN DIALOG ANTARUMAT BERAGAMA DI KEUSKUPAN ATAMBUA" (Institutional Repository, Yogyakarta, IUN SUNAN KALIJAGA, 2022).

Belu. Kearifan lokal yang menjiwai kehidupan orang-orang Belu, terimplementasi dalam kehidupan bersama dengan orang lain yang berbeda.

Debri Amabi dan Thomas Dima menulis tentang rumah adat tradisional Suku Matabesi di Kabupaten Belu. Dalam tulisan itu, dilihat rumah adat Matabesi sebagai permukiman masyarakat yang masih menjaga serta menjalankan budaya leluhur dari generasi ke generasi hingga saat ini. Wujud dari budaya masyarakat suku Matabesi adalah budaya ritual yang terdapat pada upacara adat seperti pernikahan, kelahiran, kematian, dan pertanian. Dalam tulisan itu, Debri dan Tomas menelaah pengaruh ritual terhadap tata ruang permukiman tradisional Suku Matabesi.²⁸

Karakteristik dari permukiman tradisional Suku Matabesi yang dipengaruhi oleh prosesi ritual adalah orientasi permukiman dan bangunan yang selalu mengarah ke gunung Lakaan, tata bangunan menggunakan pola berkelompok (cluster) dan selalu membuat beberapa bagian dalam permukiman menjadi tempat sakral. Selanjutnya rumah tradisional dalam permukiman tradisional memiliki ciri khas yaitu sistem struktur bangunan berpanggung dengan tata ruang yang berpusat pada kepercayaan dan tingkatan prosesi ritual.²⁹

Konsep prosesi ritual masyarakat suku Matabesi sangat sederhana, namun jika dicermati merupakan sebuah konsep ritual yang sangat harmonis antara alam dan manusia dalam tata ruang permukiman tradisional. Keberadaan suku Matabesi dengan budaya serta lingkungan dalam kawasan permukiman tradisional suku Matabesi telah ada selama lebih dari 100 tahun,

²⁸ Debri A. Amabi dan Thomas K. Dima, "Pengaruh Ritual Adat Terhadap Tata Ruang Permukiman Tradisional Suku Matabesi Di Kabupaten Belu," *GEWANG: Gerbang Wacana dan Rancang Arsitektur* 2, no. 1 (April 2020).

²⁹ Amabi dan Dima.

tetapi mereka membuktikan bahwa mereka mampu bertahan dan beradaptasi dengan perkembangan budaya.³⁰

Debri dan Tomas dalam tulisannya, menekankan pada proses ritual yang berdampak pada Tata ruang masyarakat suku Matabesi kabupaten Belu, sementara penulis justru melihat dampak dari konstruksi rumah adat Matabesi bagi kerukunan masyarakat di kabupaten Belu.

Petrus Taek dkk meneliti ekstistensi budaya suku Matabesi dalam pengaruh modernisasi dan globalisasi yang begitu deras menghantam sendi-sendi kebudayaannya. Unsur-unsur universal kebudayaan suku Matabesi tetap dijaga, dipelihara dan dikembangkan dengan kearifan lokalnya yang berdampak bagi kehidupan anak cucu Suku Matabesi.³¹

Petrus Taek dkk melihat bagaimana upaya pelestarian adat dan budaya Suku Matabesi melalui tujuh unsur universal kebudayaan Suku Matabesi yaitu sistem bahasa, sistem pengetahuan, sistem organisasi sosial, sistem peralatan dan teknologi hidup, sistem mata pencaharian, sistem religi dan sistem kesenian.³² Berbeda dengan tulisan ini, penulis memfokuskan pembahasan kearifan lokal suku Matabesi hanya pada konstruksi rumah adat, tidak membahas secara holistik tentang sistem-sistem kehidupan masyarakat Matabesi.

Terkait rumah adat, peneliti sebelumnya yaitu Thomas Kurniawan Dima dan Dewi Amabi juga melihat tentang Pola Ruang rumah adat *Ume K bubu* dan *Lopo Sonaf Afeanpah* di desa Maubesi Kabupaten Timor Tengah Utara. Dijelaskan bahwa keluarga hanya dapat membangun bangunan lain setelah memiliki *ume kbubu*. Dalam perkampungan adat, *ume kbubu* dan *lopo* adalah 2 rumah adat yang dibangun. *Ume kbubu* dan *lopo* memiliki beberapa tipe dilihat dari status kepemilikannya yaitu *ume kbubu* dan *lopo* kerajaan, *ume kbubu* dan

³⁰ Amabi dan Dima.

³¹ Taek dkk., "UPAYA PELESTARIAN TRADISI BUDAYA SUKU MATABESI DALAM MODERNISASI."

³² Taek dkk.

lopo suku serta *ume kbubu* dan *lopo* masyarakat. *Ume kbubu* juga dibagi menjadi dapur, anak laki-laki pertama, orang tua, dan induk suku. *Ume kbubu* milik Kerajaan biasa di sebut dengan Sonaf, yang berarti istana raja. Sonaf biasanya digunakan untuk ritual adat seperti perkawinan, persembahan hasil panen, dan acara lainnya, sedangkan *lopo* digunakan untuk menerima tamu dan tempat berbicara.³³

Ume kbubu dan *lopo* sonaf Afeanpah sangat penting bagi suku Afeanpah dan anak sukunya karena biasanya digunakan untuk aktivitas sehari-hari dan ritual adat. Pada *Ume Kbubu*, ruang memiliki pola melingkar yang terdiri dari ruang dalam, ruang transisi, dan ruang luar. Ruang di dalam hanya satu, tetapi memiliki ruang untuk memasak, melakukan ritual adat, dan beristirahat. Ruang transisi menghubungkan ruang luar dan dalam dengan teras. *Hauteas* di luar bangunan berfungsi sebagai pusat ritual adat. *Lopo* memiliki dua ruang yang berbentuk melingkar. Ruang bawah digunakan untuk menyambut tamu dan mengadakan pertemuan, sedangkan ruang atas digunakan untuk menyimpan hasil panen dan barang berharga.³⁴

Ume kbubu dan *Lopo* Sonaf Afeanpah adalah jenis rumah adat yang wajib dimiliki tiap keluarga dan dibangun berdasarkan tipe. Ada jenis kelamin, strata sosial, dan tujuan penggunaannya. Nilai kebersamaan tentu terkandung didalamnya melalui ruang-ruang pertemuan tetapi perbedaan tipe rumah justru memberi arti sebaliknya. Rumah adat suku Matabesi tidak melihat perbedaan pada tipe rumah tetapi pada ruang-ruang di dalam ruang keluarga dan hal itu terjadi hanya apabila ada dari anggota keluarga yang tidak memenuhi

³³ Thomas Kurniawan Dima dan Debi A. Amabi, "Pola Ruang *Ume Kbubu* dan *Lopo* Sonaf Afeanpah di Desa Maubesi, Kabupaten Timor Tengah Utara," *GEWANG: Gerbang Wacana dan Rancang Arsitektur* 5, no. 1 (26 April 2023): 22–26.

³⁴ Dima dan Amabi.

tuntutan adat yang telah disepakati. Sepanjang ada pemenuhan kewajiban maka semua berhak untuk menempati ruang-ruang adat di dalam rumah.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal di atas, masalah-masalah berikut adalah yang dibahas dalam penulisan proposal ini:

1. Bagaimana gambaran kehidupan masyarakat Belu dalam kemajemukan?
2. Bagaimana gambaran konstruksi rumah adat Matabesi dan nilai yang terkandung didalamnya?
3. Bagaimana implikasi dari nilai dan makna konstruksi rumah adat Matabesi bagi kerukunan hidup masyarakat Belu?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan makna dari rumah adat Matabesi.
2. Mengolaborasi pemaknaan terhadap rumah adat Matabesi dengan kerukunan hidup umat beragama di kabupaten Belu
3. Mengembangkan sebuah refleksi teologis tentang makna rumah adat Matabesi sebagai salah satu kearifan lokal masyarakat Belu yang memberikan sumbangan bagi kerukunan hidup masyarakat di Belu.

1.5 Manfaat Penelitian

A. Manfaat Akademis:

Sebagai seorang teolog, penulis berharap penelitian ini mampu memberikan sumbangsih nilai teologis bagi hidup bergereja bahwa kearifan budaya lokal turut memberi kontribusi bagi kehidupan bersama khususnya dalam membangun kerukunan hidup baik untuk persekutuan secara internal maupun eksternal.

B. Manfaat Praktis:

Sebagai seorang praktisi, penulis berharap penelitian ini mampu memberikan sumbangan pengetahuan kepada pembaca, untuk melihat dan menemukan akar budaya, menggali nilai baik dari dalamnya dan mendialogkan nilai-nilai itu dengan realitas kehidupan. Diharapkan bahwa tulisan ini dapat menolong tiap orang untuk menyadari identitas diri, budaya, sesama, alam semesta, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari dirinya dan semua berharga serta baik dalam pandangan Allah.

Melalui tulisan ini juga, peneliti dapat mengembangkan pengetahuan di lingkup pelayanan penulis, tempat peneliti melayani saat ini serta di mana saja peneliti ditempatkan sebagai pendeta GMIT.

1.6 Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan. Dalam bab ini penulis memaparkan latar belakang, penelitian terdahulu, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka dan kerangka pemikiran. Dalam bab ini penulis memaparkan pandangan dan kerangka berpikir dalam penelitian. Pandangan disini penulis

telaah dari teori-teori dari tokoh-tokoh yang membahas tentang definisi kearifan lokal, rumah adat dan kerukunan.

Bab III : Metode Penelitian. Bab ini membahas lokasi dan metodologi penelitian serta waktu dan jangka waktu penelitian. Penulis juga membahas sumber data dan metode pengambilan sampel, serta metode untuk validasi dan analisis data.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Analisis. Bab ini membahas hasil penelitian penulis tentang konstruksi rumah adat Matabesi dan selanjutnya menganalisis hasil penelitian itu bagi kerukunan hidup umat beragama di kabupaten Belu

Bab V : Refleksi Teologis. Bab ini membahas refleksi teologis terhadap nilai dan makna dari konstruksi rumah adat Matabesi yang berimplikasi pada kerukunan umat beragama di kabupaten Belu. Menggali isi alkitab yang memiliki harmonisasi terhadap tulisan ini.

Bab VI : Penutup. Bab ini membahas kesimpulan tulisan dari bab I hingga bab V dan saran kepada pihak-pihak pemangku kepentingan demi pencapaian tujuan dari tulisan ini.